

ISSN. 2540-783X

Vol.1

PROSIDING

2016

SNPK

Seminar
Nasional
Perbatasan
&Kemaritiman

"Penguatan Daerah Perbatasan
Yang Berbasis Kemaritiman"



PROSIDING

2016

SNPK

Seminar
Nasional
Perbatasan
&Kemaritiman

Vol.1



UMRAH



UMRAH

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
J. Raya Dampok, Telp. (0771) 7001550, Tanjungpinang 29123
Email : snpk.prodiilmuhukum@gmail.com
programstudiilmuhukum@yahoo.com



Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
J. Raya Dampok, Telp. (0771) 7001550, Tanjungpinang 29123
Email : snpk.prodiilmuhukum@gmail.com
programstudiilmuhukum@yahoo.com



**SEMINAR NASIONAL PERBATASAN, KEMARITIMAN
& CALL FOR PAPERS 2016**

“PENGUATAN DAERAH PERBATASAN YANG BERBASIS KEMARITIMAN”
GEDUNG AUDITORIUM UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG, 26 SEPTEMBER 2016



PROSIDING

Volume. 1 Bulan September 2016 ISSN.2540-783X.

Penyelenggara :

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Jl. Raya Dompok Gedung Prodi Ilmu Hukum
FISIP UMRAH Tanjungpinang (0771) 29115
Hp : 085271816991 (Irman)
E-mail : SNPK.Prodiilmuhukum@gmail.com

SUSUNAN PANITIA
SEMINAR NASIONAL PERBATASAN DAN KEMARITIMAN
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Pelindung

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Drs. H. Sonhaji, M.Si

Penanggung Jawab

Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Dr. Oksep Adhayanto, SH.,MH

Tim Reviewer

Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., MCL
Prof. Dr. Ellydar Chaidir, SH., M.Hum
Dr. Mexsaisai Indra, SH., MH
Dr. Erdianto, SH., MH
Dr. Oksep Adhayanto, SH., MH
Dr. Nofrizal, S.Pi., M.Si
Dr. Febrianti Lestari, M. Si

Panitia Pelaksana

Ketua : Irman, SH., MH
Sekretaris : Cholidi Try Ramadhani, SH
Bendahara : Enny Mandasari, S.Pd

Editor

Pery Rehendra Sucipta, SH., MH
Marnia Rani, SH., MH
Endri, SH., MH
Dewi Haryanti, SH., MH
Suryadi, MH
Muhammad Fajar Hidayat, SH.,MH

Desain & Tata Letak

Razil
Nova Andriadi, S.Pi
Didit Handi Mahfudin, S.Sos
Zulpariza, S.Sos

SAMBUTAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kegiatan Seminar Nasional Perbatasan dan Kemaritiman serta Call For Paper yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum merupakan kegiatan yang pertama kali sejak Program Studi Ilmu Hukum dibuka. Untuk itu pertama-tama saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya kegiatan ini.

Seminar Nasional mengangkat tema **“Penguatan Daerah Perbatasan yang Berbasis Kemaritiman”**, tema ini diangkat dalam upaya memberikan wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum, yang nantinya dapat memberikan masukan serta arah penguatan lembaga penegak hukum terhadap permasalahan di wilayah perbatasan.

Program Studi Ilmu Hukum dengan mengadakan kegiatan Seminar Nasional & Call For Paper ini merupakan suatu langkah yang tepat, hal ini dikarenakan sesuai dengan Visinya **“Menjadikan Program Studi Ilmu Hukum Berbasis Maritim Unggul Ditingkat Nasional Tahun 2035”**.

Atas Nama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Panitia Seminar Nasional & Call For Papers.

Serta ungkapan termakasih yang sebesar-besarnya kepada **Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D**, atas kesediaanya sebagai pembicara dalam acara Seminar Nasional Perbatasan dan Kemaritiman ini.

Akhir kata, kepada seluruh peserta saya ucapkan Selamat Datang di Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali, dan selamat mengikuti seluruh kegiatan Seminar Nasional Perbatasan dan Kemaritiman Tahun 2016.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Drs. H. Sonhaji, M.Si

SAMBUTAN KETUA PANITIA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat, rahmat dan Karunia-Nya Seminar Nasional Perbatasan dan Kemaritiman Tahun 2016 ini terselenggara dengan baik dan lancar.

Kegiatan Seminar Nasional dan Call For Papers yang menjadi bagian dari SNPK (*Seminar Nasional Perbatasan dan Kemaritiman*) merupakan yang pertama kali diselenggarakan oleh Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ditahun 2016. Dengan mengangkat tema “*Penguatan Daerah Perbatasan yang Berbasis Kemaritiman*”. Kegiatan ini semoga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan bidang ilmu hukum, baik oleh para penegak hukum, lembaga-lembaga pemerintahan, akademisi serta mahasiswa. Kumpulan paper yang telah diserahkan kepada panitia dan disajikan dalam rangkaian sesi persentasi yang diadakan selama seminar berlangsung, selanjutnya akan didokumentasikan dalam Prosiding Volume. 1 Bulan September 2016 ISSN.2540-783X.

Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota tim pengarah dan reviwer, yang telah membantu terjaminnya kualitas artikel-artikel yang disajikan dalam seminar ini. Selain itu, ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung demi kesuksesannya Seminar Nasional Perbatasan dan Kemaritiman ini.

Kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan kualitas Prosiding ini, dan akhir kata saya ucapkan terimakasih dan selamat datang kepada seluruh peserta Seminar Nasional Perbatasan dan Kemaritiman 2016 ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Panitia

Irman, SH.,MH

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| Sambutan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji | ii |
| Sambutan Ketua Panitia | iii |
| KONFLIK NEGARA-NEGARA ASEAN DAN CHINA TERHADAP KEPULAUAN SPRATLY | 1 |
| <i>Ady Muzwardi</i> | |
| COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN: | 10 |
| Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah dalam Agenda Kebijakan Pembangunan Perbatasan di Kepri Tahun 2015 | |
| <i>Eki Darmawan & Nazaki</i> | |
| KONSTRUKSI HUKUM SISTEM PEMERINTAHAN KEMARITIMAN | 27 |
| <i>Emy Hajar Abra</i> | |
| ANALISIS PROBLEMATIKA TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA | 38 |
| <i>Endri</i> | |
| SINERGI PENGELOLAAN KELAUATAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PENGUATAN POROS MARITIM INDONESIA | 51 |
| <i>Agus Prihartono PS & Fatkhul Muin</i> | |
| PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT KEPULAUAN (Perspektif Sosiologi Ekonomi) | 63 |
| <i>Suyito & Rendra Setyadiharja</i> | |
| COMMUNITY DEVELOPMENT DENGAN INTERNALISASI NILAI BUDAYA MARITIM DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU UNTUK MEMPERKUAT PROVINSI BERBASIS KEMARITIMAN | 70 |
| <i>Suhardi Mukhlis & Rendra Setyadiharja</i> | |
| TANGGUNG JAWAB BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI) TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA | 85 |
| <i>Thamrin S</i> | |

| | |
|---|-----|
| REORGANISASI SEBAGAI BAGIAN RESTRUKTURISASI UTANG KORPORASI BAYANGAN DI PERBATASAN ANTAR NEGARA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS BATAM | 96 |
| <i>Florianus Yudhi Priyo Amboro</i> | |
| PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEDAULATAN WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENURUT KONSEP NEGARA KEPULAUAN DALAM UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982 ... | 117 |
| <i>Fithriatus Shalihah</i> | |
| KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH | 124 |
| <i>Endah Pujiastuti & Dewi Tuti Muryati</i> | |
| PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DI KAWASAN PERBATASAN (Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Sebagai Garda Terdepan Kedaulatan Bangsa Di Kawasan Perbatasan Propinsi Kepulauan Riau) | 136 |
| <i>Wahjoe Pangestoeti & Rudi Subiyakto</i> | |
| ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPIKAN PUKAT HELA DAN PUKAT TARIK DI KOTA TANJUNGPINANG | 145 |
| <i>Nur. A. Dwi Putri</i> | |
| DINAMIKA DISTRIBUSI BBM DI DAERAH KEPULAUAN | 154 |
| <i>Adji Suradji Muhammad & Eka Suswaini</i> | |
| PENEGAKAN HUKUM DI ZONA TAMBAHAN | 164 |
| <i>Tomy Michael</i> | |
| PEMBERDAYAAN KEKAYAAN LAUT: SOLUSI PEMENUHAN HAK PENGHIDUPAN YANG LAYAK PADA SUKU LAUT DI PULAU GARA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU | 174 |
| <i>Winsherly Tan dan Winda Fitri</i> | |
| PERAN KPPU DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU ... | 186 |
| <i>Muhammad Fajar Hidayat</i> | |
| SENGKETA PERBATASAN DAN OTONOMI DAERAH | 198 |
| <i>Hasrul Sani Siregar</i> | |
| PROSES RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN PROSPEK DILAKUKAN PENGUJIAN DI PERADILAN (JUDICIAL REVIEW) | 204 |
| <i>Suparto</i> | |

| | |
|--|-----|
| JAUH PANGGANG DARI API: KESENJANGAN KUALITAS PELAYANAN JASA PELABUHAN DI INDONESIA ... | 214 |
| <i>Wayu Eko Yudiatmaja, Alfiandri, & Rahmat Hidayat</i> | |
| PERANAN MASYARAKAT ADAT DALAM MENJAGA KEDAULATAN DAN KEARIFAN LAUT | 226 |
| <i>Rachmad Safa'at & Dwi Yono</i> | |
| JARINGAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE LUAR NEGERI | 243 |
| <i>Suryaningsih</i> | |
| PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TANAH MASYARAKAT PESISIR TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT | 257 |
| <i>Hayatulismi & Ulfia Hasanah</i> | |
| MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN | 268 |
| <i>Admiral</i> | |
| FAKTOR–FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN KEBIJAKAN FREE TRADE ZONE (FTZ) DI KAWASAN KOTA TANJUNGPINANG KEPULAUAN RIAU | 274 |
| <i>Kustiawan</i> | |
| SEGI POSITIF DAN NEGATIF DAMPAK KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR BAHAN BAKU TAMBANG DAN MINERAL DIKAJI DARI ASPEK HUKUM INDONESIA | 295 |
| <i>Surizki Febrianto</i> | |
| PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN DI DAERAH: STUDI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG ZAKAT | 306 |
| <i>Dede Rasid & Wayu Eko Yudiatmaja</i> | |
| MEMBANGUN KEKUATAN MARITIM BERBASIS PEMBANGUNAN MANUSIA (HUMAN DEVELOPMENT) DI KEPULAUAN RIAU | 314 |
| <i>Afrizal</i> | |
| PEMENUHAN HAK-HAK TENAGA KERJA INDONESIA DI PENAMPUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015 | 328 |
| (Studi Pada Penampungan TKI Di Kota Tanjungpinang) | |
| <i>Oksep Adhayanto</i> | |
| RESIPROSITAS NELAYAN TRADISIONAL PERBATASAN DENGAN KELOMPOK NELAYAN ASING DI KECAMATAN BUNGURAN UTARA PULAU NATUNA | 339 |
| <i>Nanik Rahmawati</i> | |

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN

Oleh :

Admiral

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

admiral@law.uir.ac.id

Abstract

The ASEAN Economic Community is an impact of globalization that need a lot of support from many things including from a construction of Indonesian border area. The construction of Indonesian border area will be support an ASEAN Economic Community if the construction it self are oriented to the preparation of Indonesia for joint with the ASEAN Economic Community by a decision (policy) or regulation and empowerment of border area society.

Keyword : MEA, Border Area, Construction

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kepulauan (*Archipelago State*) dengan letak yang sangat strategis karena diapit oleh dua benua dan dua samudera, yang membentang luas mulai dari Sabang diujung Pulau Sumatera hingga Merauke di Papua. Luasnya wilayah Indonesia meliputi 17.502 pulau, termasuk didalamnya lima pulau besar yang sudah sangat dikenal selama ini, seperti Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Papua, dengan cakupan garis pantai mencapai 81.900 km.¹

Luasnya wilayah Indonesia tersebut menjadikan Indonesia berbatasan dengan banyak negara, antara lain dengan Australia, Timor Leste, Papua Nugini dan beberapa negara lainnya di benua Asia seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Batas-batas wilayah Indonesia dengan beberapa negara tersebut dipisahkan oleh wilayah perbatasan darat

dan laut.

Wilayah perbatasan dalam hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah negara. Dalam tataran ideal, wilayah perbatasan Indonesia merupakan beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama terhadap negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

Wilayah perbatasan bahkan merupakan kawasan yang strategis karena secara geografis memiliki potensi sumber daya alam dan peluang pasar karena kedekatan jarak dengan negara tetangga, dan vital karena secara politik berkaitan dengan kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, nasionalisme, ideologi, sosial, ekonomi dan budaya.²

Hanya saja kondisi pada banyak wilayah perbatasan Indonesia hingga saat ini belum memperlihatkan ditematkannya wilayah per-

¹ Infobanknews.com sebagaimana dikutip Admiral, et.all, *Revitalisasi Nilai Kesatuan Wilayah dalam Membangun Nasionalisme Masyarakat Perbatasan*, Artikel Sosialisasi Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan, Lemhannas, Pekanbaru, 2012, hlm. 1

² Irwan Lahnisafitra, *Kajian Pengembangan Wilayah pada Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak*, Thesis, Program Pascasarjana Institut Teknologi Bandung, Bandung, 2005 sebagaimana dikutip Saru Arifin, *Hukum Perbatasan Darat antar Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.5

batasan tersebut sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara pragmatis terlihat justru wilayah perbatasan tersebut tidak ubahnya seperti halaman belakang.

Tidak sedikit dari wilayah perbatasan Indonesia yang masih terisolir dengan wilayah-wilayah lainnya, begitu juga dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang masih terbatas, termasuk interaksi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan yang lebih tinggi dengan negara-negara tetangga oleh karena kemudahan akses serta ketersediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai.

Tataran ideal menjadikan wilayah perbatasan Indonesia sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mesti diwujudkan dengan berbagai kebijakan (*policy*), yang memberikan perhatian dan dukungan penuh terhadap pembangunan wilayah perbatasan, layaknya pembangunan wilayah lainnya di Indonesia.

Pembangunan wilayah perbatasan tersebut diharapkan mampu membuka keterisolan wilayah perbatasan dengan wilayah-wilayah lainnya, yakni melalui penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai, yang tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di wilayah perbatasan semata, tetapi juga dapat mendukung interaksi sosial dan ekonomi yang melibatkan warga negara dari negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

Upaya mewujudkan wilayah perbatasan Indonesia sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kiranya menjadi lebih mendesak lagi dengan adanya *ASEAN Economic Community* atau yang lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN akan mendorong semakin meningkatnya interaksi sosial dan ekonomi, yang tidak hanya sekedar melibatkan warga negara dari negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia tetapi juga negara-negara ASEAN lainnya yang tidak berbatasan langsung dengan Indonesia.

B. Masyarakat Ekonomi ASEAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan suatu upaya menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan modal), kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (*Regional Competition Policy, IPRs Action Plan, Infrastructure Development, ICT, Energy Cooperation, Taxation* dan pengembangan UKM), kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata melalui pengembangan UKM dan program-program *Initiative for ASEAN Integration (IAI)* dan integrasi penuh pada ekonomi global.³

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN bermaksud mendorong dibentuknya kawasan ekonomi yang kompetitif, dengan tujuan sebaran wilayah pembangunan ekonomi yang lebih merata dan terintegrasi secara penuh dalam ekonomi global dengan pasar dan basis produksi tunggal.

Masyarakat Ekonomi ASEAN dibentuk sebagai dampak globalisasi ekonomi, yang mendorong negara-negara di kawasan Asia Tenggara terutama yang berada di bawah naungan ASEAN, bersatu menghadapi persaingan yang begitu kuat, termasuk dari negara-negara berkembang dan tengah maju lainnya seperti India dan China.

Tuntutan pelaksanaan perdagangan bebas, menyebabkan arus barang dan jasa bebas melewati batas negara dan tidak dihambat oleh campur tangan pemerintah, baik dalam bentuk tarif maupun hambatan-hambatan lainnya.⁴

Banyak hal yang dapat dilakukan dalam mewujudkan keberhasilan Masyarakat Ekonomi ASEAN, antara lain pengembangan sumber daya manusia, pengkualifikasian profesi yang profesional, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan teknologi dan industri serta pemberdayaan peran swasta yang lebih optimal.

Bagi Indonesia, Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan peluang untuk memperluas jangkauan

³ Lihat *ASEAN Economic Community Blueprint*

⁴ Lihat Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 22

pemasaran berbagai produk barang dan jasa Indonesia pada skala internasional, apalagi Indonesia memiliki banyak komoditas unggulan yang tidak hanya diminati pasar ASEAN tetapi juga dunia. Selain itu, Masyarakat Ekonomi ASEAN dapat dijadikan peluang bagi bebas masuknya investasi maupun penyertaan modal untuk membangun dan mengembangkan industri maupun usaha, termasuk memperluas jangkauan pemasaran berbagai produk barang dan jasa serta peluang kerja pada sektor tenaga terampil.⁵

Dukungan pemerintah dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN salah satunya dapat dilihat melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang dilakukan melalui :

- 1) Pengembangan industri nasional, melalui pengembangan industri prioritas dalam rangka memenuhi pasar ASEAN sekaligus industri dalam rangka mengamankan pasar dalam negeri, pengembangan industri kecil dan menengah, pengembangan sumber daya manusia dan penelitian serta penerapan Standar Nasional Indonesia
- 2) Pengembangan pertanian, melalui peningkatan investasi langsung di sektor pertanian sekaligus akses pasarnya
- 3) Pengembangan kelautan dan perikanan, melalui penguatan kelembagaan, posisi, daya saing kelautan dan perikanan serta penguatan pasar dalam negeri dan peningkatan ekspor
- 4) Pengembangan energi, melalui pengembangan sub sektor ketenagalistrikan dan pengurangan penggunaan energi fosil, pengembangan sub sektor energi baru, terbarukan dan konservasi energi serta peningkatan pasokan energi dan listrik
- 5) Pengembangan infrastruktur yang konektif
- 6) Pengembangan sistem logistik nasional
- 7) Pengembangan perbankan
- 8) Pengembangan investasi, terutama yang

memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha

- 9) Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, melalui peningkatan daya saing dari sisi pembiayaan, sekaligus eligibilitas dan kapabilitasnya serta mendorong pemberdayaan sektor riil
- 10) Peningkatan tenaga kerja yang berdaya saing, kompeten dan produktif
- 11) Peningkatan kesehatan, melalui peningkatan ketahanan pasar jamu dalam negeri
- 12) Pengembangan perdagangan, terutama dalam kaitannya dengan stabilitas dan penguatan pasar dalam negeri, peningkatan ekspor dan kerjasama internasional, pengkajian kebijakan perdagangan dalam mendukung implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN, pengembangan fasilitas pembiayaan ekspor, edukasi publik
- 13) Pengembangan kepariwisataan, melalui pengembangan destinasi wisata, dan *event* pariwisata
- 14) Pengembangan kewirausahaan, melalui pengembangan wirausaha pemula, perluasan peran wirausaha muda dan pengembangan usaha berbasis temuan baru

C. Pembangunan Wilayah Perbatasan

Wilayah perbatasan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung Masyarakat Ekonomi ASEAN, apalagi sebelum adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN, masyarakat di wilayah perbatasan telah lebih dahulu melakukan interaksi sosial dan ekonominya dalam bentuk perdagangan lintas batas.

Untuk mewujudkan pembangunan wilayah perbatasan yang mendukung Masyarakat Ekonomi ASEAN, maka pembangunan wilayah perbatasan dimaksud tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik semata, namun juga memerlukan dukungan kebijakan dan pemberdayaan masyarakat, tujuannya adalah agar pembangunan wilayah perbatasan berlangsung optimal dan komprehensif.⁶

⁵ Lihat Admiral, *Indonesia Menuju Pasar Bebas ASEAN Economic Community*, Jurnal Selat, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, 2015

⁶ Lihat Admiral, et.all, *Revitalisasi ...*, *Op.cit*, hlm. 3-5

1. Kebijakan (*Policy*) atau Regulasi yang Berorientasi pada Pembangunan Wilayah Perbatasan

Pembangunan wilayah perbatasan yang berorientasi pada Masyarakat Ekonomi ASEAN harus dimulai dari adanya kebijakan (*policy*) atau regulasi yang berorientasi pada pembangunan wilayah perbatasan.

Kebijakan (*policy*) atau regulasi tersebut tidak hanya berkenaan dengan kebijakan perencanaan pembangunan semata, tetapi juga meliputi penganggaran (*budgeting*). Pembangunan wilayah perbatasan membutuhkan sekurang-kurangnya dukungan perencanaan dan anggaran yang dialokasikan secara khusus dan bertahap (*multiyears*) untuk membangun dan bahkan mengembangkan wilayah perbatasan.

Wilayah perbatasan tidak akan dapat menjadi beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila dukungan kebijakan (*policy*) atau regulasi hanya diarahkan pada pembangunan dan pengembangan wilayah tertentu, seperti kawasan perkotaan dan pedesaan saja.

Jika pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah, termasuk terhadap wilayah perbatasan dilakukan dengan baik, meski dilakukan secara bertahap, maka akan memberikan dampak yang sangat luas, terutama bagi kelangsungan kegiatan perekonomian masyarakat wilayah perbatasan, termasuk dalam mendukung Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Adanya kebijakan (*policy*) atau regulasi yang berorientasi pada pembangunan wilayah perbatasan ini, juga diharapkan akan menghilangkan dikotomi pembangunan antara wilayah-wilayah di tanah air.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Wilayah Perbatasan

Masih kurangnya dukungan perencanaan dan penganggaran pada banyak wilayah perbatasan, menyebabkan sulitnya ditemui ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana tersedia pada wilayah lainnya, terutama wilayah perkotaan.

Ketidaktersediaan dan keterbatasan sarana dan prasarana di banyak wilayah perbatasan, telah menyebabkan sulitnya kegiatan ekonomi masyara-

kat wilayah perbatasan. Arus perpindahan barang dan orang dari dan ke wilayah perbatasan akan tersendat dan cenderung lebih banyak mengarah ke negara tetangga.

Lemahnya geliat kegiatan ekonomi ini akan berdampak pada berkurangnya jumlah uang yang beredar dimasyarakat, yang tentu akan berdampak pada rendahnya kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan.

Penyediaan sarana dan prasarana pembangunan seperti jalan dan jembatan, serta ketersediaan angkutan umum dan akses telekomunikasi di wilayah perbatasan akan membuka keterisolan masyarakat wilayah perbatasan dengan wilayah-wilayah lainnya.

Kondisi yang berbeda justru dengan mudah dapat ditemui pada wilayah perbatasan negara tetangga. Jalan dan jembatan di wilayah perbatasan negara tetangga adalah dalam keadaan jauh lebih baik, termasuk ketersediaan angkutan umum dan akses telekomunikasi.

Kebanyakan suasana wilayah perbatasan disisi negara tetangga seperti kota, layaknya kota-kota di luar wilayah perbatasan. Bahkan tidak sedikit dari masyarakat di wilayah perbatasan yang lebih mengetahui perkembangan informasi negara tetangga daripada perkembangan informasi yang terjadi di Indonesia.

Geliat ekonominya juga lebih baik akibat dukungan ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan di wilayah perbatasan, sehingga masyarakatnya terlihat lebih sejahtera.

3. Penyediaan Sarana Pendidikan dalam Kaitannya dengan Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Perbatasan

Kurangnya dukungan perencanaan dan pengalokasian anggaran pada wilayah perbatasan, berdampak pula pada ketersediaan sarana pendidikan yang terbatas dan kurang memadai pada banyak wilayah perbatasan.

Padahal melalui penyediaan sarana pendidikan, selain dapat meningkatkan sumber daya manusia wilayah perbatasan yang lebih baik, juga akan berdampak positif pada tingginya daya saing untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, sesuai dengan jenjang pendidikan dan keahlian yang dimiliki oleh

masyarakat wilayah perbatasan.

4. Dukungan Pemberdayaan Ekonomi dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Perbatasan

Pada banyak wilayah perbatasan, ekonomi masyarakat cenderung belum berdaya optimal, selain karena keterbatasan modal (*capital*), hal ini juga disebabkan oleh *multiplier effect* dari rendahnya tingkat pendidikan dan daya saing masyarakat wilayah perbatasan.

Belum berdaya optimalnya pemberdayaan ekonomi masyarakat wilayah perbatasan ini kemudian menyebabkan masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan.

Kebijakan (*policy*) atau regulasi sebagaimana pernah disinggung di atas kiranya dapat pula diarahkan kepada pemberian bantuan dalam bentuk modal bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang berbasis pada produk kerajinan rakyat yang menjadi komoditas andalan masyarakat wilayah perbatasan. Komoditas ini biasanya menjadi daya tarik bagi wisatawan, khususnya yang berasal dari negara tetangga.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat wilayah perbatasan juga tidak hanya dapat diberikan dalam bentuk bantuan modal bagi usaha mikro, kecil dan menengah semata, tetapi juga dapat diberikan kepada industri-industri masyarakat wilayah perbatasan yang mendukung sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, yang dominan pada masing-masing wilayah perbatasan, seperti penyediaan industri pengolahan padi pada wilayah perbatasan yang didominasi oleh wilayah pertanian, atau pabrik pengolahan CPO untuk wilayah perbatasan yang didominasi oleh lahan perkebunan kelapa sawit, atau pabrik pengolahan hasil laut untuk wilayah perbatasan laut.

Selain dapat meningkatkan dan memperluas lapangan pekerjaan, keberadaan industri ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan.

5. Dukungan Pertahanan dan Keamanan di Wilayah Perbatasan yang Lebih Memadai

Tidak dapat dipungkiri bahwa luasnya wilayah

perbatasan Indonesia yang harus dijaga dan diawasi menjadi kendala tugas pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan, apalagi tugas besar tersebut juga dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana, personil dan keterbatasan lainnya.

Pengawasan pertahanan dan pengamanan yang lemah akan berdampak pada kemungkinan pencaplokan wilayah perbatasan oleh negara-negara tetangga yang tentu saja akan merugikan kepentingan strategis Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat. Selain itu pengawasan pertahanan dan pengamanan yang lemah, juga dapat menyebabkan tingginya intensitas penyeludupan barang dari dan ke Indonesia melalui wilayah perbatasan.

Perlunya pengamanan wilayah perbatasan, secara sosial dan ekonomis adalah dalam upaya memberikan perlindungan terhadap produk barang yang diperdagangkan, yakni merupakan produk barang yang baik dan tidak melawan hukum. Pengamanan wilayah perbatasan juga dapat difungsikan untuk meminimalisir berbagai peluang terjadinya tindak pidana seperti tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*).

D. Kesimpulan

Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia yang berorientasi pada Masyarakat Ekonomi ASEAN antara lain dapat dilakukan melalui dukungan kebijakan (*policy*) atau regulasi yang berorientasi pada pembangunan wilayah perbatasan, penyediaan sarana dan prasarana pembangunan wilayah perbatasan, penyediaan sarana pendidikan dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat wilayah perbatasan, dukungan pemberdayaan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan serta dukungan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan yang lebih memadai.

Jika hal ini dilakukan dengan baik dan sungguh-sungguh, maka bangsa Indonesia tidak hanya siap membangun wilayah perbatasan yang mensejahterakan masyarakatnya, tetapi juga siap menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Daftar Kepustakaan

- Admiral, *Indonesia Menuju Pasar Bebas ASEAN Economic Community*, Jurnal Selat, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, 2015
- , et.all, *Revitalisasi Nilai Kesatuan Wilayah dalam Membangun Nasionalisme Masyarakat Perbatasan*, Artikel Sosialisasi Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan, Lemhannas, Pekanbaru, 2012
- Saru Arifin, *Hukum Perbatasan Darat antar Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN
- ASEAN Economic Community Blueprint*



**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji**

Sertifikat

Diberikan Kepada :

Admiral

Atas partisipasinya sebagai :

PEMAKALAH

Dalam Seminar Nasional & Call For Papers Dengan tema
"PENGUATAN DAERAH PERBATASAN YANG BERBASIS KEMARITIMAN" diselenggarakan oleh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, 26-27 September 2016.

Ka. Program Studi Ilmu Hukum

Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H
NIP. 198109292015041002

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. H. Sonhaji, M.si
NIP. 195912061988031004



Ka. PANITIA

Irman, S.H., M.H
NIDN.0025128801

Seminar Nasional Perbatasan & Kemaritiman

SNPK